

### MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

# KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 3940 K/08/MEM/2017

#### TENTANG

# PROSES BISNIS LEVEL 0 DAN LEVEL 1 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAN PENUNJUKAN PEMILIK PROSES

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu
menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata
hubungan kerja yang efektif dan efisien di lingkungan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Proses Bisnis Level 0 dan Level 1 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Penunjukan Pemilik Proses;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  - Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tanggal 21
     Desember 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
  - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tanggal 25 Februari 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (Bussiness Process);
  - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG PROSES BISNIS LEVEL 0 DAN LEVEL 1
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAN
PENUNJUKAN PEMILIK PROSES.

Energi dan Sumber Daya Mineral yang terdiri atas proses manajerial, proses inti, dan proses pendukung serta menunjuk Pemilik Proses dengan rincian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA: Pemilik Proses sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyusun proses bisnis pada masing-masing unit organisasi sebagai penjabaran dari proses bisnis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sampai dengan Standar Operasional Prosedur;
- melakukan monitoring dan evaluasi penerapan proses
   bisnis untuk mengidentifikasi tindakan pencegahan dan perbaikan;
- memulai dan mempengaruhi perubahan prosedur kerja,
   waktu penyelesaian, dan hasil kegiatan serta
   mengendalikan sumber daya; dan
- d. melaporkan hasil evaluasi implementasi proses bisnis kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 November 2017

# MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

#### **IGNASIUS JONAN**

#### Tembusan:

- 1. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 3. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 4. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 5. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 6. Sekretaris Jenderal, Dewan Energi Nasional
- 7. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SALA BIRO HUKUM,

NIP 1950 0151981031002 A

## LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 3940 K/08/MEM/2017

TANGGAL: 10 November 2017

# PROSES BISNIS LEVEL 0 DAN LEVEL 1 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAN PENUNJUKAN PEMILIK PROSES

### A. Proses Manajerial

No.	Level 0		Level 1	Pemilik Proses
1.	Manajemen Strategis Berbasis Kinerja	1.	Perencanaan Strategis	Sekretaris Jenderal
		2.	Perencanaan Program dan Anggaran	Sekretaris Jenderal
		3.	Manajemen Kinerja Organisasi	Sekretaris Jenderal
		4.	Kajian Strategis	Sekretaris Jenderal
2.	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	1.	Lingkungan Pengendalian	Sekretaris Jenderal
		2.	Penilaian Risiko	Sekretaris Jenderal
		3.	Kegiatan Pengendalian	Sekretaris Jenderal
		4.	Informasi dan Komunikasi	Sekretaris Jenderal
		5.	Pemantauan Pengendalian Intern	Sekretaris Jenderal
		6.	Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Intern	Inspektur Jenderal

No.	Level 0		Level 1	Pemilik Proses
3.	Manajemen Perubahan	1.	Penataan Organisasi	Sekretaris Jenderal
		2.	Penataan Tata Laksana	Sekretaris Jenderal
		3.	Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur	Sekretaris Jenderal
4.	Pengawasan Intern dan Koordinasi Pengawasan Ekstern	i.	Penyusunan Perumusan Kebijakan Pengawasan Intern	Inspektur Jenderal
		2.	Pengawasan Intern Kinerja dan Keuangan	Inspektur Jenderal
		3.	Pengendalian, Pencegahan, dan Pemberantasan Korupsi	Inspektur Jenderal
		4.	Pengawasan untuk Tujuan Tertentu	Inspektur Jenderal
		5.	Koordinasi Lembaga Pengawas Ekstern	Sekretaris Jenderal

## B. Proses Inti

# 1. Penyediaan Energi dan Bahan Baku Domestik

No.	Level 0		Level 1	Pemilik Proses
1.	Peningkatan Kapasitas Penyediaan Energi Fosil	2.	Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi Pengendalian Ekspor dan Impor Minyak dan Gas Bumi	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
		3.	Percepatan Persetujuan Rencana Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
		4.	Peningkatan Kegiatan Eksplorasi dalam Rangka Peningkatan Cadangan Minyak dan Gas Bumi Baru	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
		5.	Peningkatan Kegiatan Eksplorasi dalam Rangka Peningkatan Validasi Data Sumber Daya serta Cadangan Batubara	Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
		6.	Pengendalian Produksi Batubara	Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
		7.	Pengendalian Ekspor Batubara	Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
2.	Peningkatan Produksi Mineral dan Peningkatan Nilai Tambah	2.	Peningkatan Eksplorasi dan Cadangan Mineral Peningkatan <i>Recovery</i> Produksi dan Pengolahan Mineral	Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
	=	3.	Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri	Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

No.	Level 0		Level 1	Pemilik Proses
3.	Peningkatan Produksi Energi melalui	1.	Peningkatan Pemanfaatan Gas untuk	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
	Diversifikasi Energi		Dalam Negeri	Willyan dan dad Baim
		2.	Peningkatan Produksi Energi Baru	Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
		3.	Peningkatan Produksi Energi Terbarukan	Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
		4.	Peningkatan Industri Nasional di Bidang Energi Baru, dan Energi Terbarukan	Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
4.	Peningkatan Efisiensi Pemanfaatan Energi	1.	Pengawasan Manajemen Energi	Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
		2.	Pemanfaatan Teknologi/Sistem yang Efisien dan Ramah Lingkungan	Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
		3.	Implementasi Hasil Audit Energi (Investment Grade Energy Audit)	Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
		4.	Pengembangan Usaha Jasa Konservasi Energi (Energy Services Company/ESCO)	Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
		5.	Peningkatan Industri Nasional di Bidang Efisiensi Energi	Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

No.	Level 0		Level 1	Pemilik Proses
5.	Peningkatan Penyediaan Tenaga Listrik	1.	Penyiapan Program Penyediaan Tenaga Listrik	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
		2.	Monitoring Pelaksanaan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
		3.	Program Pengembangan Listrik Perdesaan	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
		4.	Evaluasi Pelaksanaan Program Penyediaan Tenaga Listrik	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
6.	Peningkatan Akses dan Infrastruktur Energi	1.	Perencanaan, Pembangunan, dan Pengembangan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
		2.	Perencanaan, Pembangunan, dan Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
		3.	Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

No.	Level 0		Level 1	Pemilik Proses
7.	Peningkatan Alokasi Energi Domestik	1.	Peningkatan Alokasi Gas untuk Domestik	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
		2.	Penyusunan Peraturan dan Kebijakan terkait Pemenuhan Kebutuhan Minyak dan Gas Bumi dalam Negeri	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
		3.	Pemutakhiran Neraca Gas Bumi Nasional	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
		4.	Peningkatan dan Penetapan Alokasi Batubara untuk Domestik (Peningkatan Domestic Market Obligation)	Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
8.	Peningkatan Alokasi Bahan Baku Mineral untuk Domestik	1.	Peningkatan dan Penetapan Kewajiban Domestic Market Obligation Mineral	Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
		2.	Peningkatan dan Penetapan Alokasi Bahan Baku Mineral untuk Domestik	Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
		3.	Penetapan Harga Patokan Mineral	Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

# 2. Optimalisasi Penerimaan Negara Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

No.	Level 0		Level 1	Pemilik Proses
1.	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.	Pembinaan Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak	Sekretaris Jenderal
		2.	Pembinaan dan Pelaksanaan Usulan Penyaluran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam	Sekretaris Jenderal
		3.	Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Data	Sekretaris Jenderal
		4.	Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Minyak dan Gas Bumi	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
		5.	Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Mineral dan Batubara	Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
		6.	Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Panas Bumi	Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
		7.	Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Geologi	Kepala Badan Geologi
		8.	Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral

No.	Level 0		Level 1	Pemilik Proses
		9.	Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral
		10.	Pelaksanaan Usulan Penyaluran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Bidang Mineral dan Batubara	Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
		11.	Pelaksanaan Usulan Penyaluran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Bidang Panas Bumi	Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
2.	Pengelolaan Piutang	1.	Pembinaan dan Penatausahaan Piutang	Sekretaris Jenderal
		2.	Monitoring dan Evaluasi Piutang	Sekretaris Jenderal
3.	Negosiasi dan Renegosiasi Kontrak	1.	Negosiasi dan Renegosiasi Kontrak Minyak dan Gas Bumi	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
		2.	Negosiasi dan Renegosiasi Kontrak Mineral dan Batubara	Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
4.	Kebijakan Optimalisasi Penerimaan Negara	1.	Penetapan Produksi Komersial	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
		2.	Penghitungan Minyak dan Gas Bumi Bagian Negara	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

## 3. Pengalokasian Subsidi Energi

No.	Level 0		Level 1	Pemilik Proses
1.	Evaluasi Penghitungan Biaya Produksi atau Penyediaan Energi	1.	Evaluasi Penghitungan Biaya Produksi Bahan Bakar Minyak	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
		2.	Evaluasi Penghitungan Biaya Perolehan <i>Liquefied</i> Petroleum Gas Tabung 3 Kg	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
		3.	Evaluasi Penghitungan Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
		4.	Evaluasi Penghitungan Biaya Produksi Energi Baru dan Energi Terbarukan Lainnya	Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
2.	Penentuan Harga Energi	1.	Penentuan Harga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
		2.	Penentuan Harga  Liquefied Petroleum Gas  Tabung 3 Kg	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
		3.	Penentuan Harga Jual dan Tarif Listrik	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
		4.	Penentuan Harga Patokan Batubara	Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
		5.	Penentuan Harga Energi Baru dan Energi Terbarukan	Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

No.	Level 0		Level 1	Pemilik Proses
3.	Penentuan Pola Subsidi	1.	Penentuan Pola Subsidi Bahan Bakar Minyak	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
		2.	Penentuan Pola Subsidi  Liquefied Petroleum Gas  Tabung 3 Kg	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
		3.	Penentuan Penerima dan Besaran Subsidi Listrik	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
		4.	Penentuan Penerima dan Besaran Subsidi Bahan Bakar Nabati	Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
4.	Penentuan Usulan Alokasi Dana Subsidi	1.	Penentuan Usulan Volume Bahan Bakar Minyak Bersubsidi	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
		2.	Penentuan Usulan Volume Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
		3.	Penentuan Usulan Alokasi Dana Subsidi Listrik	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
		4.	Penentuan Usulan Alokasi Dana Subsidi Bahan Bakar Nabati	Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

# 4. Peningkatan Investasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

No.	Level 0		Level 1	Pemilik Proses
1.	Inventarisasi Data Potensi Investasi	1.	Inventarisasi Data Potensi Investasi Bidang Minyak dan Gas Bumi	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
		2.	Inventarisasi Data Potensi Investasi Bidang Ketenagalistrikan	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
		3.	Inventarisasi Data Potensi Investasi Bidang Mineral dan Batubara	Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
		4.	Inventarisasi Data Potensi Investasi Bidang Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
2.	Pemetaan Kebutuhan Investasi	1.	Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Minyak dan Gas Bumi	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
		2.	Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Ketenagalistrikan	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
		3.	Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Mineral dan Batubara	Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
		4.	Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
3.	Penyusunan Kebijakan Peningkatan Investasi	1.	Penyusunan Kebijakan Peningkatan Investasi Bidang Minyak dan Gas Bumi	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
	= = = =	2.	Penyusunan Kebijakan Peningkatan Investasi Bidang Ketenagalistrikan	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

No.	Level 0		Level 1	Pemilik Proses
		4.	Penyusunan Kebijakan Peningkatan Investasi Bidang Mineral dan Batubara Penyusunan Kebijakan Peningkatan Investasi Bidang Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	Direktur Jenderal Mineral dan Batubara  Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
4.	Penetapan Kegiatan Usaha Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	1.	Penetapan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
		2.	Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
		3.	Penetapan Wilayah Pertambangan, Wilayah Izin Usaha Pertambangan, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus	Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
		4.	Penetapan Wilayah Kerja Panas Bumi	Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
5.	Promosi Investasi	1.	Promosi Investasi Bidang Minyak dan Gas Bumi	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
		2.	Promosi Investasi Bidang Ketenagalistrikan	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
		3.	Promosi Investasi Bidang Mineral dan Batubara	Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

No.	Level 0		Level 1	Pemilik Proses
		4.	Promosi Investasi Bidang Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
6.	Lelang atau Permohonan Wilayah Kerja Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	1.	Lelang Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
		2.	Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
		3.	Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral Logam dan Batubara	Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
		4.	Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
		5.	Lelang Wilayah Kerja Panas Bumi	Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
		6.	Penugasan Pengusahaan Panas Bumi Kepada Badan Usaha Milik Negara	Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
7.	Monitoring Rencana dan Realisasi Investasi	1.	Monitoring Rencana dan Realisasi Investasi Minyak dan Gas Bumi	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
		2.	Monitoring Rencana dan Realisasi Investasi Ketenagalistrikan	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

No.	Level 0		Level 1	Pemilik Proses
		3.	Monitoring Rencana dan Realisasi Investasi Mineral dan Batubara Monitoring Rencana dan Realisasi Investasi Energi Baru dan Energi Terbarukan Monitoring Rencana dan Realisasi Investasi Teknologi Ramah	Direktur Jenderal Mineral dan Batubara  Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan
			Lingkungan	Konservasi Energi
8.	Pengelolaan dan Penataan Perizinan/Kontrak Investasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	2.	Pengelolaan dan Penataan Perizinan/Kontrak Investasi Bidang Minyak dan Gas Bumi Pengelolaan dan Penataan Perizinan/Kontrak Investasi Bidang Ketenagalistrikan	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi  Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
		3.	Pengelolaan dan Penataan Perizinan/ Kontrak Investasi Bidang Mineral dan Batubara	Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
		4.	Pengelolaan dan Penataan Perizinan/ Kontrak Investasi Bidang Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

5. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

	dan Sumber Daya Min	Crai		
No.	Level 0		Level 1	Pemilik Proses
1.	Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	1.	Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Bidang Minyak dan Gas Bumi	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
		2.	Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Bidang Ketenagalistrikan	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
		3.	Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Bidang Mineral dan Batubara	Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
		4.	Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Bidang Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
2.	Pembinaan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Usaha Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	1.	Pembinaan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Usaha Bidang Minyak dan Gas Bumi	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
		2.	Pembinaan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Usaha Bidang Ketenagalistrikan	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
		3.	Pembinaan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Usaha Bidang Mineral dan Batubara	Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

No.	Level 0		Level 1	Pemilik Proses
		4.	Pembinaan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Usaha Bidang Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
3.	Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	1.	Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Bidang Minyak dan Gas Bumi	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
		2.	Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Bidang Ketenagalistrikan	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
		3.	Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Bidang Mineral dan Batubara	Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
		4.	Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Bidang Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
4.	Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Usaha Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	1.	Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Usaha Bidang Minyak dan Gas Bumi	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
		2.	Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Usaha Bidang Ketenagalistrikan	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

No.	Level 0		Level 1	Pemilik Proses
		3.	Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Usaha Bidang Mineral dan Batubara Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Usaha Bidang Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	Direktur Jenderal Mineral dan Batubara  Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
5.	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Lindungan dan Keselamatan Operasi dan Usaha Penunjang Kegiatan Usaha Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	1.	Pembinaan terhadap Pelaksanaan Lindungan Lingkungan dan Keselamatan Operasi dan Usaha Penunjang Kegiatan Usaha Bidang Minyak dan Gas Bumi	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
		2.	Pengawasan terhadap Pelaksanaan Lindungan Lingkungan dan Keselamatan Operasi dan Usaha Penunjang Kegiatan Usaha Bidang Minyak dan Gas Bumi	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

# C. Proses Pendukung

No.	Level 0		Level 1	Pemilik Proses
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	1.	Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur	Sekretaris Jenderal
		2.	Pembinaan Sumber Daya Manusia Aparatur	Sekretaris Jenderal
		3.	Administrasi Kepegawaian	Sekretaris Jenderal
		4.	Perencanaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur	Sekretaris Jenderal
		5.	Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral
2.	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	1.	Perencanaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral
		2.	Penyusunan Perangkat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral

No.	Level 0		Level 1	Pemilik Proses
		4.	Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral
3.	Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi	1. 2. 3.	Pembinaan dan Pelaksanaan Anggaran Pembinaan Pengelolaan Keuangan Pembinaan dan Pelaksanaan Akuntansi serta Pelaporan Keuangan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan	Sekretaris Jenderal Sekretaris Jenderal Sekretaris Jenderal Sekretaris Jenderal
4.	Pengelolaan Data dan	1.	Anggaran, Pengelolaan Keuangan, Pelaksanaan Akuntansi, dan Pelaporan Keuangan Pembinaan Pengelolaan	Sekretaris Jenderal
	Teknologi Informasi		Data Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dan Teknologi Informasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	

No.	Level 0		Level 1	Pemilik Proses
		2.	Pengelolaan Data Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	Sekretaris Jenderal
		3.	Pengelolaan Teknologi Informasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Sekretaris Jenderal
		4.	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Sekretaris Jenderal
5.	Dukungan Regulasi dan Layanan Hukum	1.	Penyusunan Regulasi	Sekretaris Jenderal
		2.	Penelaahan Hukum	Sekretaris Jenderal
		3.	Pengelolaan Layanan Hukum	Sekretaris Jenderal
		4.	Pengelolaan Data dan Informasi Hukum	Sekretaris Jenderal
6.	Pengelolaan Pelayanan Umum	1.	Pelayanan Tata Usaha	Sekretaris Jenderal
		2.	Pengelolaan Arsip	Sekretaris Jenderal
		3.	Pengelolaan Kerumahtanggaan	Sekretaris Jenderal
		4.	Keprotokolan	Sekretaris Jenderal

No.	Level 0		Level 1	Pemilik Proses
7.	Pengelolaan Barang Milik Negara	1.	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara	Sekretaris Jenderal
		2.	Penatausahaan Barang Milik Negara	Sekretaris Jenderal
		3.	Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara	Sekretaris Jenderal
		4.	Pemindahtanganan, Penghapusan, dan Pemanfaatan Barang Milik Negara	Sekretaris Jenderal
8.	Penelitian, Penyelidikan, dan Pelayanan Kegeologian	1.	Penelitian, Penyelidikan Sumber Daya Geologi	Kepala Badan Geologi
		2.	Mitigasi Bencana Geologi	Kepala Badan Geologi
		3.	Penyelidikan dan Pelayanan Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	Kepala Badan Geologi
		4.	Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Geologi	Kepala Badan Geologi
9.	Pengelolaan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1.	Penyelenggaraaan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
		2.	Implementasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral

No.	Level 0		Level 1	Pemilik Proses
		3.	Pelayanan Jasa Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Penyampaian Masukan	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kepala Badan
		27.	Rumusan Kebijakan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
10.	Pengelolaan Komunikasi dan Pelayanan Informasi Publik	1.	Pengelolaan Publikasi Pelayanan Permintaan Informasi dan Pengaduan Masyarakat	Sekretaris Jenderal Sekretaris Jenderal
		3.	Pelayanan Perpustakaan	Sekretaris Jenderal
		4. 5.	Kehumasan Hubungan Kelembagaan	Sekretaris Jenderal Sekretaris Jenderal
11.	Pengelolaan Kerja Sama Internasional	1.	Pengelolaan Kerja Sama Bilateral	Sekretaris Jenderal
		2.	Pengelolaan Kerja Sama dalam Forum Regional dan Multilateral	Sekretaris Jenderal

# MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**IGNASIUS JONAN** 

KEPALA BIRO HUKUM,

\* HUFRON ASROFI NIP 1960 0151981031002<sub>Px</sub>